

MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM DI PAPUA BARAT MELALUI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2021

M.Iizam M*¹, Syavira P.N. ², Nelza R.M³, Libriana A.N. , Salma F.S. Mudham T. Sigid Widyantoro

Universitas Tidar; Jalan Kapten Suparman No. 39 Magelang, telp : (0293)364113 Fax : (0293)362438 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang
e-mail : ilzam.muqorrobin@gmail.com, syafiraemail130@gmail.com , nelzaamalida@gmail.com , librianaarsya55@gmail.com, Fashalinasalma380@gmail.com , mudhamtabrani90@gmail.com

ABSTRACT

Kasus kemiskinan ekstrem yang melanda di wilayah negara Indonesia yaitu daerah Papua Barat menjadi suatu fokus yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus bagi pemerintah untuk segera diselesaikan agar kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dapat membaik. Kemiskinan ekstrem yang terjadi di Papua Barat memiliki beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran warga atau masyarakat Papua Barat untuk mengenyam pendidikan layak dan kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di sana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Sustainable Development Goals untuk mengurangi atau menanggapi adanya kasus kemiskinan ekstrem yang terjadi di Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggali sumber-sumber yang telah ada, baik melalui jurnal maupun artikel-artikel yang menunjukkan data mengenai topik penelitian. Hasil yang didapatkan adalah pemerintah telah melakukan upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan program-program sosial. Program-program tersebut yang dilakukan oleh pemerintah seperti Strategi Bantuan dan Jaminan Sosial, Peningkatan Pendapatan Masyarakat, dan Pengembangan dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Ultra Mikro dan Makro di daerah Papua Barat.

Keywords : Ekstrem; kemiskinan; Papua Barat; pemerintah; Sustainable Development.

1. PENDAHULUAN

SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perlu kiranya memandang negara lain termasuk PBB juga sebagai “masyarakat negara”. Dalam memahami masyarakat negara bukanlah suatu permasalahan tentang pemakaian model-model ilmu sosial, melainkan, suatu permasalahan tentang menjadi akrab dengan sejarah dan mencoba sedekat mungkin untuk menguasai pengalaman praktisi masa lalu dan hari ini.

Oleh karena itu, perlu memahami suatu program global dari sisi historis, mengapa program tersebut muncul ke permukaan. Di hampir semua negara berkembang, penghitungan kemiskinan cenderung menggunakan pendekatan absolut (Adji et al., 2020). Berdasarkan pendekatan ini, individu miskin adalah mereka yang hidup dengan US\$1,90 sehari atau lebih kecil, yaitu mereka dengan tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah “garis kemiskinan internasional” yang tidak mengenal tapal batas antar negara, ataupun memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara

(Deonandan, 2019). Dipaparkan Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia SE.,M.Si menurut [website diskominfoperstatik.papuabaratprov.go.id/](https://diskominfoperstatik.papuabaratprov.go.id/), terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,52 ribu orang dari 221,29 ribu orang per September 2021 menjadi 218,78 ribu orang pada Maret 2022. Selain itu saat ini secara presentase turun 0,49 persen poin. Untuk Disparitas Kemiskinan masih lebih tinggi perdesaan 189,31 ribu jiwa (31,42%) dibandingkan perkotaan sebanyak 29.47 ribu jiwa (6,96%). Selanjutnya kenaikan Garis Kemiskinan pada periode September 2021-Maret 2022 sebesar 2,00 %. Beras dan Rokok menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2015 dalam *Sustainable Development Summit*, UN General Assembly menetapkan 17 sasaran inti pembangunan berkelanjutan ke depan. Ke 17 poin SDGs tersebut memberikan rambu-rambu bagi negara-negara di seluruh dunia untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di negara masing-masing. SDGs di Indonesia diatur dalam Perpres nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. ([Perpres], 2017). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPPENAS adalah koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia. Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan secara integratif sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 1995, yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Desa

Tertinggal. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi khusus yang diambil pemerintah berdasarkan [website https://portal.kominfo.go.id/](https://portal.kominfo.go.id/) adalah memberikan program Sembako dan BLT-Desa pada tiga bulan terakhir tahun anggaran 2021 kepada kabupaten-kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Papua Barat. “Untuk program Sembako, kita memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial, serta daftar nama yang digunakan Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa)”, ujarnya. Oleh karena itu, Wapres meminta gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas Papua Barat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program, baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat. “Gubernur dan para bupati saya minta agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan

karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing,” tambahnya. Khusus terkait anggaran, Anggaran dari APBN TA 2021 melalui alokasi dana Kementerian/Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar yaitu mencapai lebih dari 500 triliun Rupiah. Belum lagi, anggaran program penanggulangan yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan kemiskinan di Papua Barat dan juga untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dalam arti luas, jadi tidak hanya mencakup upaya mengatasi ketidakmampuan untuk konsumsi dasar saja tetapi juga mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan mewujudkan goals Sustainable Development Goals.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan atau library research. Mestika Zed (2003) mengatakan bahwa Studi pustaka atau kepustakaan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka yang didapat dari membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Metode ini menggunakan

dokumen-dokumen yang sifatnya valid dan kredibel untuk mengkaji dari sebuah topik penelitian. Sumber yang digunakan dapat berupa jurnal penelitian, laporan penelitian, buku, media elektronik yang terpercaya dan kredibel, dan lain-lain. Selain dokumen tertulis dan elektronik, foto-foto dan gambar akan semakin membantu hasil penelitian yang lebih kredibel. Ciri dari penelitian yang menggunakan studi kepustakaan adalah peneliti tidak berhadapan secara langsung dengan masalah yang diteliti sehingga bersifat data atau angka dan informasi yang dihadapi merupakan informasi statis yang artinya merupakan informasi yang tetap. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memahami gejala baru secara lebih mendalam yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah akan terus melanjutkan berbagai program-program unggulan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat karena sebagai faktor utama dalam penyebab kemiskinan ekstrim. Berbagai program guna pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat pun terus saja digaungkan, yang mana sebelum menentukan program yang ditentukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Papua Barat pemerintah sudah harus mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan ekstrem di

Papua Barat, faktor-faktor tersebut, seperti kurangnya fasilitas umum yang kurang memadai dikarenakan lingkungan yang ada di Papua Barat berbeda dengan wilayah Jawa yang notabennya Papua Barat jenis tempatnya sulit untuk diubah, rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan atensi dari masyarakat Papua Barat yang mengedepankan Pendidikan masih rendah, bahkan angka literasi juga masih sangat jauh, selain itu faktor lain yang menyebabkan keadaan kemiskinan di Papua Barat semakin ekstrem adalah lowongan pekerjaan yang masih kurang dikarenakan pola pikir masyarakatnya masih bersifat pedesaan.

Melihat berbagai faktor penyebab yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Papua Barat semakin ekstrem di mana total jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem mencapai 39.357 jiwa dengan 12.440 RT, maka pemerintah mengambil langkah guna mengatasinya. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, tentunya pemerintah mengencorkan pertumbuhan di berbagai bidang pembangunan. Telah ditekankan untuk mempercepat pembangunan tersebut telah dimuat kebutuhan pendanaan dalam rencana aksi dan Quick Wins pada APBN tahun anggaran 2021 yang secara umum telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga dan pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk mendukung 7 fokus dari pembangunan

kesejahteraan di Papua Barat. Semua tindakan yang dilakukan tersebut difokuskan kepada tujuan SDGs yang sama-sama berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan faktor lain di dalamnya. Pengembangan program SDGs yang dimaksud oleh pemerintah Papua Barat guna menanggulangi kemiskinan ekstrem yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Bantuan dan Jaminan Sosial

Program pemberian bantuan dan jaminan sosial kepada masyarakat di daerah Papua Barat menjadi langkah awal pemerintah Papua Barat sebagai pengentasan kemiskinan agar tidak semakin ekstrem. Hal-hal yang termasuk dalam strategi pemberian bantuan dan jaminan sosial di Papua Barat terangkum sebagai berikut;

- Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
- Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler.
- Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

Walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai strategi pemberian bantuan dan jaminan sosial seperti yang ada di atas, pemerintah di Papua Barat masih saja mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut dikarenakan wilayah geografis di

Papua Barat masih sulit dijangkau mengingat fasilitas pembangunan umum di Papua Barat juga masih kurang. Selain permasalahan tersebut pemerintah juga menghadapi permasalahan berupa infrastruktur sinyal yang juga ikut mengakibatkan penyaluran program bantuan sosial terganggu.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Melalui program lowongan pekerjaan guna mengentaskan kemiskinan, pemerintah Papua Barat menggunakan strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
- c. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
- d. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.

3. Pengembangan dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Ultra Mikro dan Makro.

Usaha mikro merupakan suatu usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat

dalam lingkup wilayah kecil yang biasanya dimiliki oleh perorangan atau keluarga secara individu atau tergabung dalam suatu grup. Sedangkan usaha makro merupakan suatu usaha yang didirikan oleh suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu dengan prospek pekerjaan yang lebih luas. Dalam perencanaan suatu program SDGs di Papua Barat, pemerintah Papua Barat turut menerapkan program guna mengembangkan dan bahkan menjamin keberlanjutan usaha ultra mikro dan makro dengan berbagai program yang selaras, seperti membuat kalkulasi guna menentukan harga jual agar selaras, menggunakan taktik pemasaran yang baik, penyaluran barang yang optimal, hingga usaha dalam bidang jasa angkutan yang bilamana dilakukan dengan tahap awal pemerintah membangun infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran usaha di Papua Barat, baik usaha mikro maupun makro.

4. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
- b. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana

transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

5. Pendampingan Desa

Program pendampingan desa melalui sistem SDGs dimulai dengan melihat wilayah geografisnya yang sulit, menurunkan rasio antara pendamping dengan jumlah desa utama. Selain itu program pendampingan desa dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dengan mengimplementasikan Permendagri no. 144 tahun 2015 dan Permendes 21 tahun 2020. Program pendampingan desa sebenarnya juga menggunakan program yang dinamakan program TEKAD yang mana program ini menghadirkan ketertinggalan kawasan timur. Dari kelima program SDGs di Papua Barat yang telah disebutkan di atas, pada prinsipnya guna mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di Papua Barat pada dasarnya berpegang pada dua aspek, yaitu aspek pendidikan dan lowongan pekerjaan seperti pada penjelasan berikut:

1. Pemberian Pendidikan yang menyeluruh bagi masyarakat di Papua Barat

Dari sekian banyaknya wilayah di Indonesia, wilayah Papua Barat merupakan salah satu wilayah yang sering disorot oleh masyarakat mengenai keadaan pendidikan yang masih mengenaskan. Keadaan tersebut dilihat dari segi fasilitas yang didapatkan oleh para murid saat di sekolah dan jumlah anak yang sekolah di daerah Papua Barat. Hal tersebut tentu menjadi tugas besar bagi pemerintah Papua,

khususnya Papua Barat untuk mengentaskan permasalahan dengan memberikan fasilitas pendidikan yang menyeluruh tanpa terkecuali. Tidak hanya bagi murid saja namun juga tenaga pendidik.

Program pemberian pendidikan secara menyeluruh di wilayah Papua Barat merupakan langkah awal sebagai tahap pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat memberikan pengajaran penting tentang kehidupan yang juga dapat mengubah pola pikir lebih berkembang dan maju. Maka dari itu, pemerintah Indonesia dengan tegas membuat sebuah pernyataan kesetaraan derajat pendidikan di Papua Barat melalui berbagai program seperti program meningkatkan kualifikasi guru menuju tenaga pendidik profesional, program pemerataan guru di berbagai sudut wilayah Papua Barat, hingga kebijakan meningkatkan fasilitas pendidikan.

2. Menyediakan Lapangan Pekerjaan

Kemiskinan ekstrem di Papua Barat tentu dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah angka pengangguran yang mencapai 35.086 dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah Papua Barat untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Papua Barat guna mengentaskan kemiskinan yang semakin ekstrem.

Hingga saat ini program masih dalam proses sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak

antara Masyarakat dan pemerintah sekalipun agar semua program yang direncanakan dapat terlaksana dengan lancar dan dapat berkelanjutan sehingga prinsip SDGs dapat berjalan dengan baik.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, adapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Papua Barat, yaitu :

1. Strategi Bantuan dan Jaminan Sosial
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
3. Pengembangan dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Ultra Mikro dan Makro
4. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan
5. Pendampingan Desa

Namun, pada dasarnya pemerintah hanya memegang pada dua aspek yang mana terdiri dari aspek pendidikan dan aspek lowongan pekerjaan.

□ Aspek Pendidikan, misalnya dilakukan dengan program peningkatan kualifikasi guru menjadi tenaga pendidik yang profesional, program pemerataan guru, dan meningkatkan fasilitas seperti sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai lagi.

□ Aspek Ketersediaan Lapangan Pekerjaan, misalnya dengan adanya penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat di Papua Barat. Agar kemiskinan di Papua Barat dapat segera diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sepakat Wiki. (2022). Panduan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem BAB III Kebijakan Saat Ini. https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/PANDUAN_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN_EKSTREM_BAB_III_KEBIJAKAN_SAAAT_INI. Diakses pada tanggal 3 November 2022.
- TNP2K. (2021). Tindaklanjuti Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Kunjungan Kerja Ke Papua Barat. <https://www.tnp2k.go.id/articles/tindaklanjuti-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-wapres-kunjungan-kerja-ke-papua-barat>. Diakses pada tanggal 3 November 2022.
- UNDP. (2012). Laporan Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro dan Kajian Situasi terkini Usaha Mikro di Provinsi Papua Barat. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_342544.pdf. Diakses pada tanggal 6 November 2022.
- Yadi, Muhammad. (2022). Harmoni Regulasi dan Prospek Pendampingan Desa di Papua Barat. <https://www.beritautama.co.id/nasional/pr-5125363994/harmoni-regulasi-dan-prospek-pendampingan-des-a-di-papua-barat>. Diakses pada tanggal 4 November 2022.
- TNP2K. (2021). Tindaklanjuti Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Kunjungan Kerja Ke Papua Barat. <https://www.tnp2k.go.id/articles/tindaklanjuti-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-wapres-kunjungan-kerja-ke-papua-barat#:~:text=Khusus%20untuk%20lima%20Kabupaten%20di,ekstrem%204%25%20dan%20jumlah%20penduduk>. Diakses pada tanggal 8 November 2022.